

**Akuntabilitas Keuangan, Kebijakan Fiskal, dan Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Kinerja Elektoral Petahana: Literature Review Berbasis PRISMA**Riya Dwi Handaka<sup>1\*</sup>, Tri Widyastuti<sup>2</sup>, Apollo Daito<sup>3</sup><sup>1</sup>Universitas Pancasila<sup>2</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta<sup>3</sup> Universitas Mercubuana*\*Corresponding Author: 5120230005@univpancasila.ac.id***Article History****Received: 13-06-2026****Revised: 21-06-2026****Published: 30-06-2026****Keywords: Political Budget Cycle, Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan Ekonomi Daerah, Retrospective Voting, Petahana.****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis hubungan literature antara akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, dan kinerja elektoral petahana dalam kerangka teori *political budget cycle* (PBC) dan *retrospective voting*. Kajian ini penting karena literatur yang ada sering berkembang secara terpisah, padahal seluruhnya dapat membentuk penilaian pemilih terhadap keterpilihan kembali petahana. Penelitian ini menggunakan *literature review* berbasis PRISMA dengan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Literatur disintesis secara tematik berdasarkan hubungan kunci antara akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, transfer pemerintah, pembangunan ekonomi, dan *retrospective voting*. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja elektoral petahana tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan instrumen fiskal menjelang pemilihan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan dan kemampuan kebijakan fiskal menghasilkan capaian pembangunan yang dirasakan oleh pemilih. Akuntabilitas keuangan melalui audit dan pelaporan keuangan dapat membatasi oportuniste fiskal, sedangkan kinerja pembangunan menjadi saluran evaluasi retrospektif pemilih terhadap petahana.

**PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala daerah merupakan arena akuntabilitas demokratis dimana pemilih dapat secara langsung menilai rekam jejak petahana, bukan hanya menilai dari janji kampanye pada saat kontestasi. Dalam perspektif *retrospective voting*, pemilih dapat memberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja masa lalu, namun proses tersebut tidak bekerja secara sistematis karena pemilih membutuhkan informasi, atribusi tanggung jawab, dan pengalaman merasakan pelayanan atas kebijakan kandidat petahana yang dapat diamati (Ferejohn, 1986; Fiorina, 1978; Healy & Malhotra, 2013). Petahana atau *incumbent* didefinisikan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Komisi Pemilihan Umum, 2020). Dalam konteks desentralisasi fiskal seperti yang terjadi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengelola APBD, menentukan prioritas belanja, memanfaatkan transfer antarpemerintah, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu,

kebijakan fiskal daerah selain menjadi instrumen administrasi dan pembangunan, sekaligus politik elektoral (Sjahrir et al., 2013; Yuliati et al., 2016).

Dalam literatur siklus anggaran politik atau lazim disebut *political budget cycle* (PBC) dijelaskan bahwa petahana atau *incumbent* dapat memiliki insentif untuk menyesuaikan kebijakan fiskal menjelang pemilihan untuk meningkatkan peluang mempertahankan kekuasaan. Pada model awal, PBC menekankan manipulasi agregat makroekonomi atau defisit fiskal, sedangkan literatur yang lebih baru menunjukkan bahwa strategi petahana sering bergerak melalui pergeseran komposisi belanja menuju program yang *visible*, cepat dirasakan, dan mudah diklaim secara politik (Drazen & Eslava, 2010; Nordhaus, 1975; Rogoff, 1990). Dalam konteks daerah, belanja berjenis hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, infrastruktur lokal, dan pelayanan publik menjadi yang lebih relevan karena pos-pos tersebut lebih dekat dengan pengalaman pemilih daripada defisit agregat (Ritonga & Alam, 2010; Sjahrir et al., 2013). Namun demikian, penggunaan anggaran menjelang pemilihan tidak selalu dapat dikategorikan sebagai manipulasi. Sebagian peningkatan belanja dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan, respons terhadap pelayanan dasar, atau siklus perencanaan tahunan. Titik kritisnya terletak pada apakah perubahan fiskal tersebut konsisten dengan prioritas pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan manfaat bagi publik, atau justru terkonsentrasi pada pos-pos diskresioner yang menguntungkan petahana secara elektoral (Brender & Drazen, 2005; Shi & Svensson, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membaca PBC sebagai strategi anggaran, tetapi juga menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai filter yang membedakan kebijakan fiskal responsif dari oportunistik fiskal (Alt & Lassen, 2006; Rakhman & Saudagaran, 2023).

Akuntabilitas keuangan menjadi dimensi penting karena proses audit, opini audit, temuan audit, kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat memberi sinyal mengenai kualitas tata kelola fiskal daerah. Studi yang dilakukan Yuliati dkk. (2016) memperlihatkan bahwa temuan audit atas kelemahan pengendalian intern dapat menurunkan peluang keterpilihan kembali petahana, sedangkan skor kinerja pemerintah daerah meningkatkan peluang tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi akuntabilitas keuangan dapat memasuki arena elektoral melalui media, oposisi, lembaga pengawas, dan pemilih yang memiliki informasi, sehingga akuntabilitas tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga politis (Rakhman & Saudagaran, 2023; Yuliati et al., 2016).

Pembangunan ekonomi daerah menjadi kanal yang menghubungkan kebijakan fiskal dan akuntabilitas keuangan dengan evaluasi pemilih. Pemilih lebih mungkin menilai petahana secara positif ketika kebijakan fiskal menghasilkan capaian yang terlihat, seperti pertumbuhan ekonomi daerah, perbaikan infrastruktur, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta kualitas layanan publik yang lebih baik (Boyne et al., 2009; Deswantoro et al., 2017). Namun demikian, hubungan antara pembangunan dengan elektoral tidak selalu berbanding lurus melainkan bersifat kondisional. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan atas isu lokal, loyalitas politik pemilih, kemampuan pemilih dalam

mengatribusikan keberhasilan pembangunan dari petahana, dan adanya kecenderungan efek bias negatif, dimana pemilih cenderung memberikan respon atau sanksi elektoral yang lebih berat pada kinerja buruk dibandingkan apresiasi untuk kinerja lebih baik (Achen & Bartels, 2016; Boyne et al., 2009; Healy & Malhotra, 2013).

Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan sudut pandang yang lebih luas dari *literature review* yang hanya berfokus pada PBC. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga determinan yaitu akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi untuk menjelaskan kinerja elektoral petahana. Integrasi ini penting karena strategi fiskal petahana hanya akan bernilai elektoral apabila kebijakan tersebut lolos dari ujian akuntabilitas, dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan, dan dapat diatribusikan oleh pemilih kepada petahana (Drazen & Eslava, 2010; Healy & Malhotra, 2013; Yuliati et al., 2016). Untuk itu, penelitian ini bertujuan menyusun *literature review* berbasis PRISMA yang menawarkan sintesis konseptual baru mengenai mekanisme hubungan akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi pada kinerja elektoral petahana (Page et al., 2021; Snyder, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *literature review* sistematis (SLR) dengan mengacu pada prinsip PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). PRISMA dipilih karena membantu penulis menjelaskan tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi secara transparan, meskipun artikel ini tidak melakukan meta-analisis statistik (Page et al., 2021). Pendekatan ini juga sejalan dengan praktik *review* sistematis dalam ilmu sosial yang menekankan keterlacakan proses seleksi literatur, konsistensi kriteria, dan sintesis tematik atas studi empiris maupun teoretis (Snyder, 2019; Tranfield et al., 2003).

Pada tahap identifikasi, literatur dikumpulkan dari hasil penelusuran menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan sumber Scopus, Google Scholar, dan *Web of Science* hingga periode 2026 pada dengan kombinasi kata kunci yang mencakup “political budget cycle”, “akuntabilitas keuangan”, “audit finding”, “intergovernmental transfer”, “fiscal policy”, “development performance”, “retrospective voting”, “incumbent reelection”, dan “local government”. Kata kunci tersebut dipilih karena mewakili literatur empiris kontemporer mengenai titik temu antara siklus anggaran politik (PBC) dan retrospective voting melalui tiga rumpun analisis: akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi, serta outcome elektoral petahana.

Pada tahap penyaringan, publikasi yang tidak terkait dengan konteks subjek hubungan fiskal-elektoral, publikasi duplikat, dan dokumen tanpa informasi bibliografis memadai dikeluarkan dari proses sintesis. Pada tahap kelayakan, literatur dinilai berdasarkan keterkaitannya dengan pemerintah daerah, petahana, audit, transfer pemerintah, strategi anggaran, kinerja pembangunan, atau evaluasi pemilih. Pada tahap inklusi, literatur dikelompokkan ke dalam tema akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, transfer pemerintah, pembangunan ekonomi, dan *retrospective voting* (Kitchenham, 2004; Page et al., 2021).

Sintesis dilakukan secara tematik, karena literatur yang dikaji menggunakan konteks, metode, dan ukuran variabel yang beragam. Pendekatan tematik memungkinkan artikel ini menggabungkan studi akuntansi sektor publik, ekonomi politik fiskal, pembangunan ekonomi, dan perilaku pemilih ke dalam satu kerangka argumentasi (Snyder, 2019; Tranfield et al., 2003). Untuk menjaga validitas narasi, artikel ini menempatkan setiap tema dalam dialog kritis yaitu apakah kebijakan fiskal benar-benar menghasilkan dukungan elektoral, kapan akuntabilitas keuangan menghambat oportunistik fiskal, dan bagaimana pembangunan menjadi sinyal yang dipercaya atau justru dipertanyakan pemilih (Boyne et al., 2009; Brender & Drazen, 2008).

**Tabel 1.** Protokol seleksi literatur berbasis PRISMA

| Tahap PRISMA | Kegiatan   | Kriteria utama  | Rujukan metode                    | Output                                     |
|--------------|--|---|-----------------------------------|--|
| Identifikasi | Menelusuri literatur PBC, audit, transfer, pembangunan, dan voting | Terkait fiskal daerah, akuntabilitas keuangan, pembangunan, atau petahana | Page et al. (2021); Snyder (2019) | Korpus awal literatur (560 artikel)        |
| Penyaringan  | Menghapus duplikasi dan publikasi tidak relevan                    | Memiliki judul, abstrak, dan informasi bibliografis memadai               | Kitchenham (2004)                 | Literatur terseleksi awal (310)            |
| Kelayakan    | Menilai isi berdasarkan konteks pemerintah daerah dan pemilihan    | Memuat mekanisme fiskal-elektoral, audit, transfer, atau pembangunan      | Tranfield et al. (2003)           | Artikel inti dan pendukung (139)           |
| Inklusi      | Mengelompokkan literatur secara tematik                            | Masuk tema akuntabilitas, fiskal, transfer, pembangunan, atau voting      | Snyder (2019)                     | Sintesis tematik dan model konseptual (40) |

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Page et al. (2021), Tranfield et al. (2003), Kitchenham (2004), dan Snyder (2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Tematik

Hasil analisis tematik dengan SLR PRISMA menunjukkan lima pola utama. Pertama, literatur PBC bergerak dari fokus pada defisit agregat menuju perubahan komposisi anggaran. Pergeseran ini penting karena pada tingkat daerah, pemilih lebih mudah mengamati hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, infrastruktur, dan pelayanan publik dibanding indikator fiskal agregat (Darmastuti & Setyaningrum, 2019; Drazen & Eslava, 2010; Mansyur & Mansyur, 2022; mhy et al., 2025; Sjahrir et al., 2013; Widawati & Widagdo, 2020; Winer et al., 2021). Dengan demikian, hasil *review* memperlihatkan bahwa instrumen fiskal yang bersifat *visible* menjadi pusat strategi elektoral petahana, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan pemilih menghubungkan manfaat program dengan petahana (Brender & Drazen, 2005; Shi & Svensson, 2006).

Kedua, akuntabilitas keuangan muncul sebagai tema yang membantu menilai apakah strategi fiskal petahana mencerminkan kebijakan pembangunan yang dapat

dipertanggungjawabkan atau menunjukkan indikasi penggunaan fiskal yang berorientasi elektoral. Studi Yuliati et al. (2016) menunjukkan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern dapat menurunkan probabilitas petahana terpilih kembali, sedangkan kinerja pemerintah daerah meningkatkan peluang tersebut. Rakhman dan Saudagaran (2023) menunjukkan bahwa indikasi PBC tidak hanya dapat diamati melalui perubahan anggaran, tetapi juga melalui pola laporan keuangan pemerintah daerah, seperti perubahan surplus/defisit anggaran dan penurunan saldo kas menjelang pemilihan. Namun, pola tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena penurunan surplus dan saldo kas tidak selalu menunjukkan perilaku oportunistik, namun dapat pula mencerminkan realisasi belanja pembangunan yang sah. Dengan demikian, laporan keuangan dan audit lebih tepat diposisikan sebagai sumber informasi untuk menilai kredibilitas fiskal, bukan sebagai bukti tunggal adanya manipulasi elektoral. Hasil ini memperlihatkan bahwa laporan keuangan dan audit bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sumber informasi yang dapat memengaruhi reputasi fiskal petahana (Rakhman & Saudagaran, 2023; Yuliati et al., 2016).

Ketiga, transfer pemerintah berperan ganda sebagai instrumen pemerataan fiskal dan sumber daya politik. Literatur menunjukkan bahwa alokasi transfer tidak selalu hanya ditentukan kebutuhan fiskal, tetapi dapat dipengaruhi ukuran yurisdiksi, hubungan politik, dan kepentingan distributif (Boex & Martinez-Vazquez, 2005; Tobing et al., 2013). Studi Suyoto dan Adrison (2020) juga menunjukkan bahwa belanja melalui Tugas Pembantuan dan capaian kinerja periode sebelumnya berhubungan dengan kemenangan *incumbent*. Hasil ini mengindikasikan bahwa transfer pemerintah memiliki efek elektoral tidak langsung melalui visibilitas program dan kinerja pembangunan (Bury & Feld, 2026; Corvalan et al., 2018; Labonne, 2013; Suyoto & Adrison, 2020).

Keempat, pembangunan ekonomi daerah menjadi kanal evaluasi pemilih. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, dan kualitas layanan publik menjadi bentuk kinerja yang dapat digunakan pemilih untuk menilai petahana (Boyne et al., 2009; Deswanto et al., 2017; Kozal et al., 2024; Rumayya et al., 2020). Namun, hasil penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa kinerja pembangunan tidak otomatis menghasilkan insetif elektoral. Pemilih perlu mengetahui kinerja pembangunan tersebut dan meyakini bahwa capaian itu merupakan hasil kebijakan atau kinerja petahana, bukan semata-mata akibat program pemerintah pusat, kondisi ekonomi nasional, atau faktor eksternal lainnya (Achen & Bartels, 2016; Healy & Malhotra, 2013).

Kelima, metode, data, dan hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan perbedaan penekanan. Studi PBC umumnya menggunakan data fiskal dan pemilu untuk mendeteksi perubahan belanja menjelang pemilihan, studi akuntabilitas keuangan menggunakan opini dan temuan audit, sedangkan studi *retrospective voting* menekankan evaluasi pemilih terhadap kinerja masa lalu (Healy & Malhotra, 2013; Sjahrir et al., 2013; Yuliati et al., 2016). Persamaan berbagai studi tersebut terletak pada asumsi bahwa pemilih merespons kinerja, tetapi perbedaannya terletak pada jenis sinyal yang dianggap paling penting apakah melalui sinyal

fiskal, sinyal akuntabilitas, atau sinyal pembangunan (Boyne et al., 2009; Brender & Drazen, 2008).

**Tabel 2.** Hasil sintesis tematik, perbandingan studi, dan celah riset rujukan utama

| Tema hasil                | Rujukan utama   | Data/metode dominan                        | Temuan utama  | Perbedaan/kritik   | Implikasi untuk riset ini  |
|---------------------------|---|--|---|--|--|
| Akuntabilitas keuangan    | Yuliati et al. (2016); Rakhman & Saudagaran (2023)                                    | Audit, laporan keuangan, data elektoral    | Temuan audit dan kualitas laporan memberi sinyal tata kelola    | Opini audit belum tentu mudah dipahami pemilih               | Akuntabilitas keuangan dibaca sebagai mekanisme korektif elektoral |
| Kebijakan fiskal/PBC      | Nordhaus (1975); Rogoff (1990); Drazen & Eslava (2010); Sjahrir et al. (2013)         | Data APBD, belanja, pemilu                 | PBC bergeser ke komposisi belanja visible                       | Tidak semua belanja pra-pemilu adalah manipulasi             | Perlu menilai kualitas alokasi dan konsistensi pembangunan         |
| Transfer antar pemerintah | Boex & Martinez-Vazquez (2005); Tobing & Brodjonegoro (2013); Suyoto & Adrison (2020) | Transfer, alokasi politik, hasil pemilu    | Transfer memperluas kapasitas fiskal dan dapat bernilai politik | Efek transfer tidak langsung dan bergantung pada visibilitas | Transfer ditempatkan sebagai sumber daya fiskal-politik            |
| Pembangunan ekonomi       | Boyne et al. (2009); Deswanto et al. (2017); Healy & Malhotra (2013)                  | Indikator pembangunan dan evaluasi kinerja | Pembangunan menjadi dasar evaluasi pemilih                      | Atribusi pemilih sering tidak sempurna                       | Pembangunan diposisikan sebagai kanal mediasi                      |
| Retrospective voting      | Fiorina (1978); Ferejohn (1986); Achen & Bartels (2016)                               | Teori voting, perilaku pemilih             | Pemilih memberi reward/punishment atas kinerja                  | Bias informasi dan loyalitas membatasi rasionalitas          | Model perlu memasukkan informasi, media, dan kualitas institusi    |

Sumber: Diolah penulis dari sintesis literatur.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tematik, masalah penelitian telah terjawab bahwa akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi daerah memang membentuk kinerja elektoral petahana, tetapi hubungan tersebut bersifat tidak langsung dan bersyarat. Kebijakan fiskal menyediakan instrumen bagi petahana, akuntabilitas keuangan menentukan kredibilitas penggunaan instrumen tersebut, dan pembangunan ekonomi daerah menentukan apakah kebijakan fiskal menghasilkan capaian yang dapat dinilai pemilih sebagai *reward* atau *punishment* (Boyne et al., 2009; Drazen & Eslava, 2010; Yuliati et al., 2016). Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan petahana untuk dievaluasi tidak cukup dijelaskan oleh kenaikan

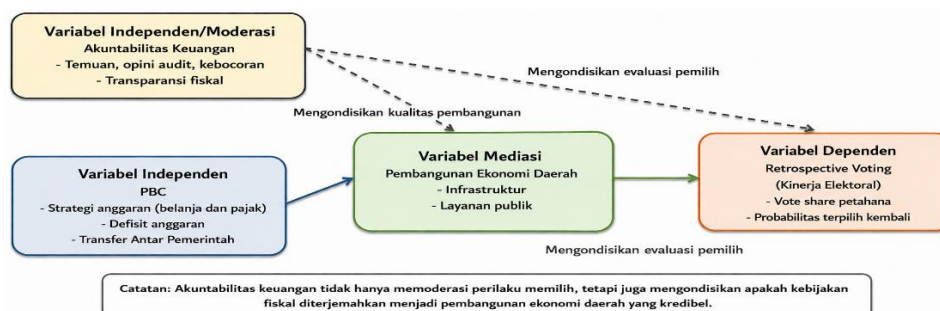
belanja, tetapi oleh kualitas alokasi, kualitas tata kelola, dan kualitas hasil pembangunan (Brender & Drazen, 2008; Healy & Malhotra, 2013).

Pada studi terdahulu menunjukkan bahwa studi PBC berkontribusi menjelaskan insentif dan strategi fiskal petahana, tetapi sering belum cukup menjelaskan apakah strategi tersebut menghasilkan pembangunan yang dipercaya pemilih (Nordhaus, 1975; Rogoff, 1990; Sjahrir et al., 2013). Sebaliknya, studi akuntabilitas keuangan menjelaskan sinyal tata kelola, tetapi belum selalu menempatkannya dalam jalur pembangunan dan perilaku pemilih (Rakhman & Saudagaran, 2023; Yuliati et al., 2016). Studi pembangunan ekonomi daerah menjelaskan outcome kesejahteraan, tetapi sering diperlakukan sebagai variabel kontrol, bukan sebagai mekanisme evaluasi politik (Boyne et al., 2009; Deswanto et al., 2017). Untuk itu, hasil penelitian ini menyatukan tiga jalur tersebut agar hubungan fiskal dengan elektoral dapat dipahami lebih utuh.

Tolok ukur keberhasilan sintesis ini adalah terbentuknya model yang menjelaskan sebab dan jalur hubungan antarvariabel. Sebab utama muncul dari insentif petahana untuk memanfaatkan ruang fiskal menjelang pemilihan. Jalur pertama adalah strategi fiskal melalui belanja diskresioner dan transfer, jalur kedua adalah akuntabilitas keuangan melalui audit dan laporan keuangan; jalur ketiga adalah pembangunan ekonomi daerah melalui kinerja yang dirasakan pemilih, dan jalur keempat adalah evaluasi retrospektif pemilih yang dipengaruhi informasi, media, dan atribusi tanggung jawab (Alt & Lassen, 2006; Boex & Martinez-Vazquez, 2005; Healy & Malhotra, 2013)

Kegagalan atau keterbatasan hubungan fiskal dengan elektoral muncul ketika salah satu jalur tersebut tidak bekerja. Peningkatan belanja dapat gagal memberi keuntungan elektoral jika tidak terlihat, tidak tepat sasaran, atau tidak dapat diklaim oleh petahana. Transfer pemerintah dapat gagal menjadi modal politik jika tidak menghasilkan pembangunan atau justru memunculkan temuan audit. Kinerja pembangunan juga dapat gagal menjadi penghargaan elektoral jika pemilih tidak memiliki informasi atau tidak mengatribusikan keberhasilan kepada petahana (Achen & Bartels, 2016; Boyne et al., 2009; Yuliati et al., 2016).

Atas dasar hasil keterhubungan antara hubungan fiskal dalam konteks PBC, serta akuntabilitas dan pembangunan ekonomi sebagai bahan evaluasi bagi electoral petahanan dalam konteks retrospektif voting maka dapat mensintesis model sebagaimana di tampilan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Model Konseptual Akuntabilitas, PBC, Pembangunan Ekonomi terhadap Elektoral

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan selanjutnya atas temuan penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lanjutan dengan menguji model hubungan secara empiris menggunakan data panel kabupaten/kota baik (contoh: SEM-PLS). Data yang relevan meliputi realisasi APBD, perubahan APBD, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, transfer pemerintah, opini dan temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, indikator pembangunan, serta hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dengan desain tersebut, penelitian mendatang dapat menguji dan membuktikan apakah akuntabilitas keuangan memperlemah oportunistik fiskal dan apakah pembangunan ekonomi daerah memediasi hubungan antara kapasitas fiskal dan kinerja elektoral petahana (Healy & Malhotra, 2013; Rakhman & Saudagaran, 2023; Suyoto & Adrison, 2020).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian melalui pendekatan SLR PRISMA ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi daerah merupakan tiga rumpun yang saling terkait dalam menjelaskan kinerja elektoral petahana. Kebijakan fiskal memberi ruang bagi petahana untuk membentuk sinyal kinerja melalui strategi anggaran, belanja diskresioner, dan transfer pemerintah. Namun demikian, efek elektoral dari kebijakan fiskal tidak otomatis muncul sebagai insentif karena bergantung pada kualitas akuntabilitas, visibilitas program, informasi pemilih, dan kemampuan kebijakan tersebut menghasilkan capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat. Adapun akuntabilitas keuangan melalui audit, pelaporan keuangan, dan pengendalian intern dapat menjadi pembatas bagi perilaku fiskal oportunistik. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah menjadi kanal evaluasi retrospektif bagi pemilih dalam menilai petahana berdasarkan hasil yang dapat dirasakan, seperti layanan publik, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, hubungan fiskal-elektoral bersifat kontekstual, tidak langsung, dan perlu diuji melalui model yang menggabungkan ketiga rumpun tersebut.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji model konseptual yang dibentuk dalam penelitian ini secara empiris dengan menggunakan data realisasi APBD, perubahan APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, temuan audit, transfer pemerintah, indikator pembangunan, dan hasil Pilkada. Studi lanjutan juga perlu memasukkan variabel non-ekonomi dan non-fiskal seperti kualitas kandidat, kompetisi politik, media lokal, kekuatan partai, dan loyalitas partisan agar penjelasan mengenai kinerja elektoral petahana menjadi lebih lengkap dan relevan bagi penguatan demokrasi lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achen, C. H., & Bartels, L. M. (2016). *Democracy for Realists: Why Elections do not Produce Responsive Government* (T. Mendelberg (ed.); Vol. 15, Issue 2). Princeton University Press. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/for-2017-0024/html>
- Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries. *American Journal of Political Science*, 50(3), 530–550. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00200.x>
- Boex, J., & Martinez-Vazquez, J. (2005). The Determinants of the Incidence of Intergovernmental

- Grants: A Survey of the International Experience. *SSRN Electronic Journal*, April. <https://doi.org/10.2139/ssrn.902454>
- Boyne, G. A., James, O., John, P., & Petrovsky, N. (2009). Democracy and government performance: Holding incumbents accountable in english local governments. *Journal of Politics*, 71(4), 1273–1284. <https://doi.org/10.1017/S0022381609990089>
- Brender, A., & Drazen, A. (2005). Political budget cycles in new versus established democracies. *Journal of Monetary Economics*, 52(7), 1271–1295. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2005.04.004>
- Brender, A., & Drazen, A. (2008). How Do Budget Deficits and Economic Growth Affect Reelection Prospects? Evidence from a Large Panel of Countries. *American Economic Review*, 98(5), 2203–2220. <https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2203>
- Bury, Y., & Feld, L. P. (2026). Do local elections affect the spending of intergovernmental transfers? Evidence from Germany's stimulus package of 2009. *Public Choice*. <https://doi.org/10.1007/s11127-025-01354-6>
- Corvalan, A., Cox, P., & Osorio, R. (2018). Indirect political budget cycles: Evidence from Chilean municipalities. *Journal of Development Economics*, 133(562), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.001>
- Darmastuti, D., & Setyaningrum, D. (2019). The Effect Of Discretionary Spending On Incumbent Victories in Elections. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 685–693. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7488>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Drazen, A., & Eslava, M. (2010). Electoral manipulation via voter-friendly spending: Theory and evidence. *Journal of Development Economics*, 92(1), 39–52. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.01.001>
- Ferejohn, J. (1986). Incumbent performance and electoral control. *Public Choice*, 50(1–3), 5–25. <https://doi.org/10.1007/BF00124924>
- Fiorina, M. P. (1978). Economic Retrospective Voting in American National Elections: A Micro-Analysis. *American Journal of Political Science*, 22(2), 426–443. [https://web.stanford.edu/~mfiorina/Fiorina Web Files/RetroVot1978.pdf](https://web.stanford.edu/~mfiorina/Fiorina%20Web%20Files/RetroVot1978.pdf)
- Healy, A., & Malhotra, N. (2013). Retrospective Voting Reconsidered. *Annual Review of Political Science*, 16(1), 285–306. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032211-212920>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews, Version 1.0. *Empirical Software Engineering*, 33(2004), 1–26.
- Kozal, O., Karacuka, M., & Haucap, J. (2024). Social and economic determinants of electoral behavior in Turkey. *Review of Economics and Political Science*, 9(3), 233–264. <https://doi.org/10.1108/REPS-07-2023-0084>
- Labonne, J. (2013). The local electoral impacts of conditional cash transfers. Evidence from a field experiment. *Journal of Development Economics*, 104, 73–88. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.04.006>
- Mansyur, A. R., & Mansyur, A. R. (2022). Pengaruh Kebijakan Restriksi Pemberian Hibah Bansos terhadap Politisasi Anggaran oleh Calon Incumbent pada Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.21002/jke.2022.01>
- mhy, subeno, Pramuka, B., Adawiyah, W. R., & Ahmad, A. (2025). *Disrupting the Poverty Trap: Political Budget Cycles and the Interlocking Movement in Decentralized Indonesia* (pp. 1–29). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7001329/v1>
- Nordhaus, W. D. (1975). The Political Business Cycle. *The Review of Economic Studies*, 42(2), 169. <https://doi.org/10.2307/2296528>

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Journal of Clinical Epidemiology*, *134*, 178–189. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.03.001>
- Rakhman, F., & Saudagaran, S. (2023). The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money & Management*, *43*(5), 512–520. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369>
- Ritonga, I. T., & Alam, M. I. (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). *Symposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, *4*, 1–25.
- Rogoff, K. (1990). Equilibrium Political Budget Cycles. *American Economic Review*, *80*(1), 21–36. <http://www.jstor.org/stable/2006731>
- Rumayya, Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The local economy and Re-election of incumbent district leaders in Indonesia. *Heliyon*, *6*(5), e04098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04098>
- Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why? *Journal of Public Economics*, *90*(8–9), 1367–1389. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2005.09.009>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, *120*(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suyoto, E. A. K., & Adrison, V. (2020). Efektivitas Pola Alokasi Anggaran Terhadap Kemenangan Incumbent. *INFO ARTHA*, *4*(2), 181–192. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i2.1024>
- Tobing, L., Syareza, M., & Brodjonegoro, B. P. (2013). Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *13*(2), 143–158. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i2.436>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, *14*(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pub. L. No. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173382/peraturan-kpu-no-1-tahun-2020>
- Widawati, M. W., & Widagdo, A. K. (2020). Politization of Local Government Budget Allocations in 2017 Election. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *12*(1), 48–58. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23723>
- Winer, S. L., Ferris, J. S., Dash, B. B., & Chakraborty, P. (2021). Political competitiveness and the private–public structure of public expenditure: a model and empirics for the Indian States. *International Tax and Public Finance*, *28*(6), 1430–1471. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09642-1>
- Yuliati, R., Raharjo, S. S., & Siswanto, D. (2016). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, *9*(3), 157–168. <https://doi.org/10.21632/irjbs.9.3.157-168>